



# **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023**

**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Natuna  
Tahun 2022**

## KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2023 dapat terselesaikan. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2023 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Beberapa hal yang diperlukan sebelum dilakukannya Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2023 adalah :

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
2. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/ atau realisasi APBD.

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan penjabaran dari Renstra yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna, yang selanjutnya akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, dan target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna telah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN NATUNA**



## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang .....   | 1         |
| 1.2. Landasan Hukum .....   | 4         |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....  | 6         |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....  | 6         |
| <br>  |           |
| <b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA<br/>KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA TAHUN<br/>LALU .....</b>    | <b>7</b>  |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan<br>Transmigrasi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah<br>..... | 7         |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ... ..   | 12        |
| 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat<br>Daerah .....   | 17        |
| 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....  | 19        |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....   | 19        |
| <br>  |           |
| <b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA DAN<br/>TRASNSMIGRASI.....</b>   | <b>20</b> |
| 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....   | 20        |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran .....   | 25        |
| <br>  |           |
| <b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....</b>   | <b>29</b> |
| 4.1. Program dan Kegiatan .....   | 29        |
| <br>  |           |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>37</b> |

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna adalah mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya, mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, aset, dan barang persediaan, merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan hubungan industrial, membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup dinas, mengkoordinasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkupnya.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan hubungan industrial;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan hubungan industrial;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan hubungan industrial;
- d. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan hubungan industrial;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan gambaran tentang program dan kegiatan

yang akan dikerjakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam satu tahun anggaran sekaligus menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Badan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna diawali dengan persiapan penyusunan renja, dilanjutkan dengan Penyusunan Rancangan Renja, Forum SKPD, dan Penetapan Renja melalui Peraturan Bupati Kabupaten Natuna.

### **1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Persiapan Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencakup :

- 1) Penyusunan rancangan Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang pembentukan tim penyusun Renja;
- 2) Orientasi mengenai Renja;
- 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja; dan
- 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

### **2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah**

Aktivitas dalam penyusunan Rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah meliputi :

- 1) Perumusan Rancangan Renja, dan
- 2) Penyajian Rancangan Renja.

Perumusan rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencakup :

- a) Pengolahan data dan informasi;
- b) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu berdasarkan Renstra;
- c) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- d) Telaahan terhadap rancangan awal Renja;
- e) Perumusan tujuan dan sasaran;
- f) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- g) Perumusan kegiatan prioritas;
- h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja;
- i) Penyempurnaan rancangan Renja;
- j) Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan
- k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

### 3. Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan. Dalam Forum Perangkat Daerah ini rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibahas, sehingga diperoleh masukan perbaikan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

### 4. Penetapan Renja SKPD

Pada tahap ini, rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah disempurnakan dan sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD Kabupaten Natuna, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Renja Kementerian/Lembaga. Penyusunan Renja mengacu pada Rancangan Awal RKPD, dan memperhatikan dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2021-2026 serta Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2019-2024. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan RKA dan DPA.

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna;

15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 84 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 84);

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna tahun 2023 sebagai berikut:

#### 1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ke dalam rencana tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

#### 2. Tujuan

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ke dalam program dan kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program dan kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2023;

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna tahun 2022 sebagai berikut:

- Bab I   Pendahuluan;  
          memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan;
- Bab II   Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;  
          memuat evaluasi pelaksanaan Renja, analisis kinerja, isu-isu penyelenggaraan tugas dan Fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan telaah usulan program dan kegiatan;
- Bab III  Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;  
          memuat telaah visi misi dan program kepala daerah, telaah renja Kementerian dan Provinsi, penentuan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran strategis;
- Bab IV  Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;



memuat program dan kegiatan serta pagu anggaran; dan

Bab V Penutup

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA TAHUN LALU**

#### **2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna berjalan dengan baik. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp. 6.102.653.144,75,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.583.836.026,00 atau sebesar 91,50%.

Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2021 dan capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna.

1. Daftar program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**
- I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
  - I.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - I.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
    - I.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - I.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
    - I.3.1 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
  - I.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah**
    - I.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - I.3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - I.3.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - I.3.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - I.3.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - I.3.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
    - I.3.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - I.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
    - I.4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - I.4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
    - I.4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - I.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
    - I.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - I.5.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

**II. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**

I. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

I.I Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

**III. Program Penempatan Tenaga Kerja**

I. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

I.I Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online

**IV. Program Hubungan Industrial**

I. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

I.I Pencegahan Perselisihan hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. Dari semua program/kegiatan yang ada terdapat satu program yang masih belum tercapai kinerjanya yaitu program penempatan tenaga kerja.
3. Faktor-faktor penyebab terpecahnya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan yaitu sebagai berikut:
  - a. Komitmen dan kerjasama dari pimpinan unit, pelaksana kegiatan, pejabat pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan waktu yang telah ditetapkan.
  - b. Dukungan Perangkat Daerah terkait dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau.
4. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja/hasil pada program penempatan tenaga kerja yaitu pencari kerja yang mendaftar AK1 tidak melaporkan apakah mereka ditempatkan atau belum padahal sudah diingatkan oleh petugas dinas untuk melaporkan kepada dinas .
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna. Capaian renstra secara umum telah berjalan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa perbaikan kedepannya.
6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil pada penyusunan Renja tahun 2023 yaitu perlu dilakukan sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung capaian target kinerja.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna s/d Tahun 2021 terlihat pada Tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra**  
**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tahun 2020 dan 2021**

| Kode            | Sasaran  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                     | Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)    | Satuan          | Target Renstra PD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD) | Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 |       | Realisasi Kinerja pada Triwulan |    |    |               |       |               |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2021 yang dievaluasi (%) |               | Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2021 |               | Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021 |        | Permasalahan |               |        |        |  |
|-----------------|--|---|---|-----------------|--|---|-------|---------------------------------|----|----|---------------|-------|---------------|----|---------------|---|---------------|---|---------------|--|---------------|---|--------|--------------|---------------|--------|--------|--|
|                 |  |   |   |                 |  | 6   |       | 7                               |    | 8  |               | 9     |               | 10 |               | 11  |               | 12=8+9+10+11  |               | 13=12/7 x100                             |               | 14=6+12   |        |              | 15=14/5x100   |        |        |  |
|                 |  |   |   |                 |  | K   | Rp    | K                               | Rp | K  | Rp            | K     | Rp            | K  | Rp            | K   | Rp            | K   | Rp            | K  | Rp            | K   | Rp     |              | K             | Rp     |        |  |
| 2.              | Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                 |   | 4,A             |  |   |       |                                 |    |    |               |       |               |    |               |   |               |   |               |  |               |   |        |              |               |        |        |  |
| 2.07.           |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA   |   |                 |  |   |       |                                 |    |    |               |       |               |    |               |   |               |   |               |  |               |   |        |              |               |        |        |  |
| 2.07.01         |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA                            | Predikat / Nilai Akuntabilitas                            | Nilai/ Predikat | A / 80   | 9,934,919,000   | 80.78 | 272,330,407                     |    | 80 | 5,870,151,485 | 81.87 | -             | 0  | 1,456,526,639 | 0.00  | 1,412,984,350 | 0.00  | 1,384,670,676 | 81.87                                    | 4,254,181,665 | 102.34  | 72.47  | 163          | 4,526,512,072 | 100.00 | 45.56  |  |
| 2.07.01.2.01    |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Predikat / Nilai Akuntabilitas                            | Nilai/ Predikat | A / 80   | 425,000,000   | 80.78 | 272,330,407                     |    | 80 | 16,270,600    | 81.87 | -             | 0  | 999,800       | 0.00  | 5,229,000     | 0.00  | 10,041,800    | 81.87                                    | 16,270,600    | 102.34  | 100.00 | 163          | 288,601,007   | 100.00 | 67.91  |  |
| 2.07.01.2.01.06 |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan  | Dokumen         | 12   | 425,000,000   | 8     | 272,330,407                     |    | 2  | 16,270,600    | 1     | -             | 1  | 999,800       | 0   | 5,229,000     | 0   | 10,041,800    | 2  | 16,270,600    | 100.00  | 100.00 | 10           | 288,601,007   | 83.33  | 67.91  |  |
| 2.07.01.2.02    |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran           | Bulan           | 60   | 2,946,000,000   | 48    | 1,467,064,488                   |    | 12 | 4,747,232,540 | 3     | 1,030,394,743 | 3  | 1,300,165,766 | 3   | 1,252,093,227 | 3   | 1,108,581,764 | 12                                       | 4,691,235,500 | 100.00  | 98.82  | 60           | 6,158,299,988 | 100.00 | 209.04 |  |
| 2.07.01.2.02.01 |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Pegawai  | Orang           | 30   | 2,946,000,000   | 59    | 1,467,064,488                   |    | 30 | 4,747,232,540 | 33    | 1,030,394,743 | 33 | 1,300,165,766 | 31  | 1,252,093,227 | 33  | 1,108,581,764 | 31                                       | 4,691,235,500 | 103.33  | 98.82  | 90           | 6,158,299,988 | 100.00 | 209.04 |  |
| 2.07.01.2.03    |  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi perkantoran           | Bulan           | 60   | 285,641,000   | 48    | 177,350,000                     |    | 12 | 28,667,183    | 3     | 5,000,000     | 3  | 9,998,000     | 3   | 4,967,000     | 3   | 8,698,000     | 12                                       | 28,663,000    | 100.00  | 99.99  | 60           | 206,013,000   | 100.00 | 72.12  |  |
| 2.07.01.2.03.07 |  | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor                 | Bulan           | 60   | 285,641,000   | 48    | 177,350,000                     |    | 12 | 28,667,183    | 3     | 5,000,000     | 3  | 9,998,000     | 3   | 4,967,000     | 3   | 8,698,000     | 12                                       | 28,663,000    | 100.00  | 99.99  | 60           | 206,013,000   | 100.00 | 72.12  |  |
| 2.07.01.2.06    |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi perkantoran           | Bulan           | 60   | 2,330,620,000   | 48    | 2,329,809,689                   |    | 12 | 470,959,403   | 3     | 18,574,300    | 3  | 44,800,900    | 3   | 53,367,828    | 3   | 144,004,870   | 12                                       | 260,747,898   | 100.00  | 55.37  | 60           | 2,590,557,587 | 100.00 | 111.15 |  |
| 2.07.01.2.06.01 |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Komponen Instalasi Listrik                         | Komponen        | 10   | 230,000,000   | 24    | 50,066,000                      |    | 10 | 1,802,000     | 0     | -             | 2  | 998,000       | 0   | -             | 0   | -             | 2  | 998,000       | 20.00   | 55.38  | 26           | 510,540,000   | 260.00 | 22.20  |  |
| 2.07.01.2.06.02 |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis           | 9  | 550,000,000   | 19    | 489,120,500                     |    | 6  | 300,000,000   | 0     | -             | 0  | -             | 0   | -             | 6   | 97,625,000    | 6  | 97,625,000    | 100.00  | 32.54  | 25           | 586,745,500   | 277.78 | 106.68 |  |
| 2.07.01.2.06.03 |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Jumlah Bulan Penyediaan Kebersihan Kantor                 | Bulan           | 60   | 181,260,000   | 48    | 149,502,000                     |    | 12 | 46,000,000    | 3     | 9,000,000     | 3  | 14,000,000    | 3   | 9,000,000     | 3   | 9,000,000     | 12                                       | 41,000,000    | 100.00  | 88.13  | 60           | 160,502,000   | 100.00 | 105.10 |  |



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna pada tahun 2021 secara keseluruhan relatif baik. Hal ini terlihat dari sebanyak 4 indikator program yang ditargetkan dalam Renja tahun 2021, hanya 1 program yang capaian nya masih dibawah target. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian target kinerja pada urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi tergolong baik.

Secara rinci capaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna disajikan pada Tabel 2.2

**Tabel 2.2**  
**Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2020**

| Program Prioritas  | Indikator Kinerja                                     | Satuan           | Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2016) | Target Kinerja Akhir Renstra (2021) | Target dan Realisasi Kinerja Tahun Renstra Ke-4 (2020) |                                    |  |
|--|---|------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------------|--|
|  |   |                  |  |                                     | Target Kinerja Renja tahun 2020                        | Realisasi Kinerja Renja tahun 2020 | Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2020 (%) |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan  | Predikat / Nilai Akuntabilitas                        | Bulan            | 12   | 60                                  | 12   | 12                                 | 100  |
| Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur                              | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur | %                | 60   | 75                                  | 70   | 59,13                              | 84,47  |
| Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Predikat / Nilai Akuntabilitas                        | Predikat / Nilai | CC/5 2,58                                  | A/80                                | BB/76  | A/80,78                            | 106,29   |
| Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja                    | Persentase lulusan pelatihan yang berkompoten         | %                | 0  | 92                                  | 91   | 96,88                              | 106,46   |

**Tabel 2.3**  
**Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga**  
**Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021**

| Program Prioritas                                      | Indikator Kinerja   | Satuan     | Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2020) | Target Kinerja Akhir Renstra (2021) | Target dan Realisasi Kinerja Tahun Renstra Ke-1 (2021) |                                    |  |
|--|---|------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------------|--|
|  |   |            |  |                                     | Target Kinerja Renja tahun 2021                        | Realisasi Kinerja Renja tahun 2021 | Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 (%) |
| Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota  | Predikat / Nilai Akuntabilitas                                | Nilai      | 80,78/A                                    | A/80                                | 80 /A  | 81,87/A                            | 102,34   |
| Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase lulusan pelatihan yang Berkompeten                 | Perse<br>n | 96,88                                      | 92                                  | 92   | 67,19                              | 73,03  |
| Program Penempatan Tenaga Kerja                        | Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan                 | Perse<br>n | 53,15                                      | 60                                  | 60   | 20,31                              | 33,85  |
| Program Hubungan Industrial                            | Persentase pekerja yang mengikuti jaminan sosial tenaga kerja | Perse<br>n | 90   | 90                                  | 90   | 75                                 | 83,33  |

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

- a. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :
  - 1) Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar
  - 2) Sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja
  - 3) Sistem informasi ketenagakerjaan belum memadai
  - 4) Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintahan desa tentang program transmigrasi
  - 5) Belum adanya data penunjang yang dapat digunakan sebagai dasar usulan untuk pengembangan kawasan transmigrasi.
- b. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki tantangan untuk mendorong seluruh perangkat daerah dalam memecahkan isu strategis di Kabupaten Natuna, meliputi :

  - a) Masih banyaknya jumlah pengangguran yang memiliki pendidikan formal (SMU/SMK/Perguruan Tinggi) yang belum memiliki kualifikasi kompetensi yang diharapkan oleh pasar tenaga kerja/dunia usaha.
  - b) Terbatasnya anggaran daerah untuk pelatihan ketenagakerjaan.
  - c) Terbatasnya peluang kesempatan kerja yang tersedia di Kabupaten Natuna.
  - d) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki BLK sehingga tidak berkembangnya jenis pelatihan yang dilaksanakan.
  - e) Kurangnya Sumber Daya Manusia khususnya Tenaga Instruktur yang



memiliki sertifikat kompetensi.

- f) Minimnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dasar penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja.
- g) Minimnya SDM yang menangani ketransmigrasian

c. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

- a) Minat/motivasi pencari kerja untuk mengikuti pelatihan yang dilaksanakan di BLK Natuna maupun diselenggarakan di BLK luar.
- b) Adanya dukungan anggaran pusat untuk percepatan pencapaian pelayanan bidang ketenagakerjaan.
- c) Terdapat beberapa perusahaan/pengusaha lokal yang mau bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk mempekerjakan pencari kerja yang telah berserifikat kompetensi untuk diangkat sebagai karyawan pada tempat usaha mereka.
- d) Kondisi keamanan yang relative stabil sehingga tidak ada demo atau kasus yang melibatkan pekerja-pengusaha.
- e) Dukungan ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk pengembangan pelayanan.
- f) Terbukanya peluang dan kesempatan masyarakat ekonomi lemah (kurang sejahtera) untuk merubah dan memperbaiki taraf hidup;
- g) Dana yang tersedia lewat APBN dan lembaga ekonomi yang lain;
- h) Adanya otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab;
- i) Adanya koordinasi lintas sektoral/dinas, K/L terkait;
- j) Adanya jaringan kemitraan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah, Antar Pemerintah Daerah, Antar lintas sektoral dengan masyarakat, lembaga ekonomi, mitra usaha (investor) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM/Organisasi sosial).;
- k) Meningkatnya kepedulian stakeholder terhadap penyelenggaraan bidang ketransmigrasian;

Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing dalam menghadapi pasar kerja dan iklim hubungan industrial yang harmonis dan kondusif.
2. Perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa eks. satuan

permukiman transmigrasi dan sekitarnya di kawasan transmigrasi.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Natuna tahun 2022, secara umum telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan program dan kegiatan dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan.

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Berdasarkan RPJMN 2020 - 2024, Visi Misi Presiden 2020 – 2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005 – 2025. RPJMN 2020 – 2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, yang diwujudkan ke dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan tahun 2020 – 2024 yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan ;  
Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :
  - 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
  - 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

- 1) Pengembangan sektor/ komoditas/ kegiatan unggulan daerah,
- 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
- 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
- 4) Memperkuat kemampuan SDM dan iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
- 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Pengentasan kemiskinan; dan
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Membangun kebudayaan dan Karakter Bangsa;

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsabangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

- 1) Memperkokuh ketahanan budaya bangsa;

- 2) Memajukan kebudayaan;
  - 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
  - 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga dan
  - 5) Meningkatkan budaya literasi
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
  - 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
  - 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
  - 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien dan
  - 5) Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
- Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
  - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
  - 3) Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
- Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :
- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
  - 2) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil,
  - 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
  - 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi dan
  - 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar

negeri

Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2022, antara lain meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,97 persen;
2. Indeks Status Mutu Air sebesar 50;
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,65;
4. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,19 persen;
5. Tingkat Aksesibilitas Daerah 15 Kecamatan;
6. Angka Kriminalitas (kasus) sebanyak 1:16,30;
7. Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar Indeks A (3,26).

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021: “**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**”, maka fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana, dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5-5,5 persen dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 3,0 persen
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,7 persen; IPM menjadi 72,78-72,90; gini rasio pada kisaran 0,377 – 0,379; tingkat pengangguran terbuka 7,5-8,2 persen;
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 3,9-5,1 persen, Jawa-Bali 4,8-5,5 persen, Kalimantan 3,6-5,7 persen, Sulawesi 5,4-7,0 persen, Nusa Tenggara 3,5-5,2 persen, Maluku 5,2-6,2 persen dan Papua 2,6-5,8 persen.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2022 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang. pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu **“Peningkatan Kesejahteraan dan Daya Saing melalui Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Serta Pengembangan Infrastruktur”**.

Pembangunan di Kepulauan Riau pada tahun 2022 mempunyai prioritas yaitu:

1. Pembangunan manusia yang berkualitas, unggul dan budaya
2. Peningkatan kesejahteraan ekonomi yang merata
3. Pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
4. Peningkatan tata kelola Pemerintahan yang optimal

Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan prioritas pembangunan provinsi tahun 2022 sehingga penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema **“Peningkatan Kesejahteraan dan Daya Saing melalui Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Serta Pengembangan Infrastruktur”**.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna mendorong pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten dan meningkatkan perluasan kesempatan kerja.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan dengan lebih mengoperasionalkan pelaksanaan misi. Tujuan juga mencerminkan adanya prioritas program dan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui perumusan tujuan diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan, program serta kegiatan. Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya secara kolektif menggambarkan arah strategisnya dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan demikian Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 tahun ke depan. Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran.

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistim pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.



Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator kinerja masukan dan keluaran dapat dinilai sebelum kegiatan selesai, karena masukan adalah semua bahan termasuk orang, material, alat, dan uang yang digunakan dalam proses untuk menghasilkan output. Sedangkan keluaran adalah suatu wujud atau keadaan yang diciptakan melalui proses yang mempunyai nilai tambah untuk dimanfaatkan.

Untuk indikator hasil, manfaat, dan dampak akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan. Hasil adalah kegunaan langsung dari output atau manfaat suatu output ditinjau dari maksud atau sasaran output tersebut dihasilkan, manfaat adalah kegunaan lebih lanjut yang diharapkan dikaitkan dengan tujuan jangka menengah. Sedangkan dampak adalah kegunaan akhir dari output yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang atau tujuan akhir.

Penetapan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna untuk periode Renstra 2021-2026, beserta indikator capaiannya diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai.

Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna adalah Meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja melalui peningkatan keterampilan bagi pencari kerja. Sedangkan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna adalah Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja.

Tabel tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

| <b>MISI 2 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal</b>                             |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>Tujuan</b>   | <b>Indikator Tujuan</b>   | <b>Sasaran</b>  | <b>Indikator Sasaran</b>   |
| Meningkatnya Angka Partisipasi Angkatan Kerja Melalui Peningkatan Keterampilan Bagi Pencari Kerja | Angka Partisipasi Angkatan Kerja                                      | Meningkatnya Angka Partisipasi Angkatan Kerja Melalui Peningkatan Keterampilan Bagi Pencari Kerja | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                                       |
| Terwujudnya Penyelesaian Permasalahan Keteransmigrasian di Kawasan Transmigrasi Kabupaten Natuna  | Persentase Kawasan Eks Transmigrasi yang difasilitasi Penyelesaiannya | Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Keteransmigrasian di Kawasan Transmigrasi Kabupaten Natuna | Persentase Penyelesaian Permasalahan keteransmigrasian yang diselesaikan |
| <b>MISI 6 : Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (SMART BUREAUCRACY)</b>                   |   |   |  |
| Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel  | Nilai SAKIP   | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah   | Nilai LAKIP  |
| Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima   | Indeks Pelayanan Publik   | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat  | Indeks Kepuasan Masyarakat   |

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran beserta Program Tahun 2023**  
**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna**

| Tujuan   | Sasaran   | Indikator Sasaran  | Satuan | Target Indikator Sasaran 2023 | Nama Program   | Indikator Kinerja Program  | Satuan | Target Kinerja Program Tahun 2023 |
|--|---|--|--------|-------------------------------|--|--|--------|-----------------------------------|
| 1. Meningkatnya Angka Partisipasi Angkatan Kerja Melalui Peningkatan Keterampilan Bagi Pencari Kerja | Meningkatnya Angka Partisipasi Angkatan Kerja Melalui Peningkatan Keterampilan Bagi Pencari Kerja | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                                       | %      | 72,35                         | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi                         | Persen | 0,12                              |
|  |   |  |        |                               | Program Pempatan tenaga kerja                          | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan                                 | Persen | 92                                |
|  |   |  |        |                               | Program Hubungan Industrial                            | Persentase perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak       | Persen | 3                                 |
| 2. Terwujudnya Penyelesaian Permasalahan Keteransmigrasian di Kawasan Transmigrasi Kabupaten Natuna  | Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Keteransmigrasian di Kawasan Transmigrasi Kabupaten Natuna | Persentase Penyelesaian Permasalahan keteransmigrasian yang diselesaikan | %      | 60                            | Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi               | Persentase Kawasan Transmigrasi yang Ditetapkan                          | Persen | 100                               |
|  |   |  |        |                               | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi              | Persentase Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan                        | Persen | 100                               |
| 3. Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel  | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah   | Nilai LAKIP  | Nilai  | 81,89                         | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Nilai Laporan LKjIP  | Nilai  | 81,89                             |
| 4. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima   | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat  | Indeks Kepuasan Masyarakat   | Nilai  | 3,47                          | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP | Persen | 85                                |

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Program dan Kegiatan**

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna pada tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

- a. Mengarah pada urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2021-2026,
- b. Mengarahkan pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2021-2026.

Secara rinci program dan kegiatan serta Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna tahun 2023 tertuang dalam Tabel berikut ini (Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024).

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja guna mendukung pencapaian visi Kabupaten Natuna tahun 2021-2026.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pejabat struktural di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2022 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2023 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2023.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan program dan kegiatan Renja tahun 2023 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Kepala Dinas dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik.

Dengan adanya Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan pada urusan ketenagakerjaan dan urusan transmigrasi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan perangkat daerah yang lain. Semoga dengan tersusunnya Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2023, mendorong peningkatan kualitas kinerja dapat perannya sebagai perangkat daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan dan urusan transmigrasi. Selain itu, diharapkan Rencana Kerja tahun 2023 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan

dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026.

Ranai, 23 Agustus 2022

**KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN NATUNA**



**H. HUSSYAINI, S.IP**  
**NIP. 19640806 199103 3 018**

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024  
KABUPATEN NATUNA**

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB KEGIATAN                       | PRIORITAS DAERAH                               | SASARAN<br>PEMBANGUNAN                                 | LOKASI              | INDIKATOR KINERJA   |                |   |            | PAGU<br>INDIKATIF | PRAKIRAAN<br>MAJU | JENIS<br>PROG &<br>KEG |
|------------------|---|--|--|---------------------|---|----------------|---|------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                  |   |  |  |                     | PROGRAM/OUTCOME   |                | KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT  |            |                   |                   |                        |
|                  |   |  |  |                     | URAIAN  | TARGET         | URAIAN  | TARGET     |                   |                   |                        |
| (1)              | (2)   | (3)  | (4)  | (5)                 | (6)   | (7)            | (8)   | (9)        | (10)              | (11)              | (12)                   |
| 2.               | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB<br>YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN<br>PELAYANAN DASAR                       |  |  |                     |   |                |   |            | 6,739,886,020     | 6,873,730,000     |                        |
| 2.07.            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG<br>TENAGA KERJA  |  |  |                     |   |                |   |            | 6,739,886,020     | 6,873,730,000     |                        |
| 01.01.           | <u>DINAS TENAGA KERJA DAN<br/>TRANSMIGRASI</u>  |  |  |                     |   |                |   |            | 6,682,886,020     | 6,816,730,000     |                        |
| 2.07.01.         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                 | Peningkatan Kualitas<br>Sumber Daya<br>Manusia | Meningkatnya<br>Birokrasi yang Bersih<br>dan Akuntabel |                     | NILAI LAPORAN LKJIP   | 81.89<br>Nilai |   |            | 80,000,000        | 80,000,000        |                        |
| 2.07.01.2.01.    | Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                               |  |  |                     |   |                | Persentase Realisasi<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah   | 100 Persen | 80,000,000        | 80,000,000        |                        |
| 2.07.01.2.01.01. | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah  |  |  |                     |   |                | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah   | 2 Dokumen  | 40,000,000        | 40,000,000        |                        |
|                  | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah   |  |  | Kabupaten<br>Natuna |   |                |   | 2 Dokumen  | 40,000,000        | 40,000,000        |                        |
| 2.07.01.2.01.06. | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD       |  |  |                     |   |                | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | 2 Laporan  | 40,000,000        | 40,000,000        |                        |
|                  | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD |  |  | Kabupaten<br>Natuna |   |                |   | 2 Laporan  | 40,000,000        | 40,000,000        |                        |
| 2.07.01.         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                 | Peningkatan Kualitas<br>Sumber Daya<br>Manusia | Meningkatnya<br>Birokrasi yang Bersih<br>dan Akuntabel |                     | PERSENTASE<br>LAYANAN<br>DUKUNGAN<br>ADMINISTRASI<br>KESEKRETARIATAN<br>YANG SESUAI SOP | 85<br>Persen   |   |            | 5,316,530,000     | 5,316,530,000     |                        |

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PRIORITAS DAERAH | SASARAN<br>PEMBANGUNAN | LOKASI           | INDIKATOR KINERJA |        |  |                | PAGU<br>INDIKATIF | PRAKIRAAN<br>MAJU | JENIS<br>PROG &<br>KEG |
|------------------|---|------------------|------------------------|------------------|-------------------|--------|--|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                  |   |                  |                        |                  | PROGRAM/OUTCOME   |        | KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT   |                |                   |                   |                        |
|                  |   |                  |                        |                  | URAIAN            | TARGET | URAIAN   | TARGET         |                   |                   |                        |
| (1)              | (2)   | (3)              | (4)                    | (5)              | (6)               | (7)    | (8)  | (9)            | (10)              | (11)              | (12)                   |
| 2.07.01.2.02.    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                      |                  |                        |                  |                   |        | Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      | 1 Tepat Waktu  | 4,600,030,000     | 4,600,030,000     |                        |
| 2.07.01.2.02.01. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |                  |                        |                  |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 33 Orang/bulan | 4,600,030,000     | 4,600,030,000     |                        |
|                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |  | 33 Orang/bulan | 4,600,030,000     | 4,600,030,000     |                        |
| 2.07.01.2.05.    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                   |                  |                        |                  |                   |        | Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah                         | 95 Persen      | 15,000,000        | 15,000,000        |                        |
| 2.07.01.2.05.11. | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                  |                  |                        |                  |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 2 Orang        | 15,000,000        | 15,000,000        |                        |
|                  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                  |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |  | 2 Orang        | 15,000,000        | 15,000,000        |                        |
| 2.07.01.2.06.    | Administrasi Umum Perangkat Daerah  |                  |                        |                  |                   |        | Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran                             | 57 Persen      | 201,000,000       | 201,000,000       |                        |
| 2.07.01.2.06.01. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            |                  |                        |                  |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 12 Paket       | 3,000,000         | 3,000,000         |                        |
|                  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |  | 12 Paket       | 3,000,000         | 3,000,000         |                        |
| 2.07.01.2.06.02. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                |                  |                        |                  |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 12 Paket       | 50,000,000        | 50,000,000        |                        |
|                  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |  | 12 Paket       | 50,000,000        | 50,000,000        |                        |
| 2.07.01.2.06.03. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   |                  |                        |                  |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 12 Paket       | 5,000,000         | 5,000,000         |                        |
|                  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |  | 12 Paket       | 5,000,000         | 5,000,000         |                        |



PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PRIORITAS DAERAH | SASARAN<br>PEMBANGUNAN | LOKASI           | INDIKATOR KINERJA |        |  |            | PAGU<br>INDIKATIF | PRAKIRAAN<br>MAJU | JENIS<br>PROG &<br>KEG |
|------------------|---|------------------|------------------------|------------------|-------------------|--------|--|------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                  |   |                  |                        |                  | PROGRAM/OUTCOME   |        | KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT   |            |                   |                   |                        |
|                  |   |                  |                        |                  | URAIAN            | TARGET | URAIAN   | TARGET     |                   |                   |                        |
| (1)              | (2)   | (3)              | (4)                    | (5)              | (6)               | (7)    | (8)  | (9)        | (10)              | (11)              | (12)                   |
| 2.07.01.2.06.04. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |                  |                        |                  |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | 12 Paket   | 6,000,000         | 6,000,000         |                        |
|                  | Belanja Bahan Logistik Kantor   |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |  | 12 Paket   | 6,000,000         | 6,000,000         |                        |
| 2.07.01.2.06.05. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                     |                  |                        |                  |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 24 Paket   | 44,999,980        | 44,999,980        |                        |
|                  | Belanja cetak   |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |  | 12 Paket   | 22,000,000        | 22,000,000        |                        |
|                  | Belanja Penggandaan   |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |  | 12 Paket   | 22,999,980        | 22,999,980        |                        |
| 2.07.01.2.06.06. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                    |                  |                        |                  |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 Dokumen  | 7,000,000         | 7,000,000         |                        |
|                  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                    |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |  | 5 Dokumen  | 7,000,000         | 7,000,000         |                        |
| 2.07.01.2.06.09. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                        |                  |                        |                  |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 40 Laporan | 75,000,020        | 75,000,020        |                        |
|                  | Belanja Makan Minum Rapat   |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |  | 20 Laporan | 5,000,000         | 5,000,000         |                        |
|                  | Belanja perjalanan dinas  |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |  | 20 Laporan | 70,000,020        | 70,000,020        |                        |
| 2.07.01.2.06.10. | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                       |                  |                        |                  |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                         | 12 Dokumen | 10,000,000        | 10,000,000        |                        |
|                  | Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                               |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |  | 12 Dokumen | 10,000,000        | 10,000,000        |                        |
| 2.07.01.2.07.    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            |                  |                        |                  |                   |        | Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah                         | 55 Persen  | 88,000,000        | 88,000,000        |                        |
| 2.07.01.2.07.02. | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                         |                  |                        |                  |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan        | 1 Unit     | 46,000,000        | 46,000,000        |                        |
|                  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                         |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |  | 1 Unit     | 46,000,000        | 46,000,000        |                        |

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PRIORITAS DAERAH | SASARAN<br>PEMBANGUNAN | LOKASI           | INDIKATOR KINERJA |        |  |            | PAGU<br>INDIKATIF | PRAKIRAAN<br>MAJU | JENIS<br>PROG &<br>KEG |
|------------------|---|------------------|------------------------|------------------|-------------------|--------|--|------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                  |   |                  |                        |                  | PROGRAM/OUTCOME   |        | KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT   |            |                   |                   |                        |
|                  |   |                  |                        |                  | URAIAN            | TARGET | URAIAN   | TARGET     |                   |                   |                        |
| (1)              | (2)   | (3)              | (4)                    | (5)              | (6)               | (7)    | (8)  | (9)        | (10)              | (11)              | (12)                   |
| 2.07.01.2.07.05. | Pengadaan Mebel   |                  |                        |                  |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 2 Unit     | 10,000,000        | 10,000,000        |                        |
|                  | Pengadaan Lemari Arsip  |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |  | 1 Unit     | 5,000,000         | 5,000,000         |                        |
|                  | Pengadaan Kursi Sopa Tamu   |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |  | 1 Unit     | 5,000,000         | 5,000,000         |                        |
| 2.07.01.2.07.06. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                       |                  |                        |                  |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 8 Unit     | 32,000,000        | 32,000,000        |                        |
|                  | Pengadaan CCTV  |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |  | 1 Unit     | 2,000,000         | 2,000,000         |                        |
|                  | Pengadaan drone   |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |  | 1 Unit     | 3,000,000         | 3,000,000         |                        |
|                  | Pengadaan GPS   |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |  | 1 Unit     | 4,000,000         | 4,000,000         |                        |
|                  | Pengadaan Hardisk Eksternal   |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |  | 1 Unit     | 3,000,000         | 3,000,000         |                        |
|                  | Pengadaan Infocus   |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |  | 1 Unit     | 3,000,000         | 3,000,000         |                        |
|                  | Pengadaan komputer/PC   |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |  | 1 Unit     | 5,000,000         | 5,000,000         |                        |
|                  | Pengadaan Laptop  |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |  | 1 Unit     | 7,000,000         | 7,000,000         |                        |
|                  | Pengadaan perangkat jaringan internet                                       |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |  | 1 Unit     | 5,000,000         | 5,000,000         |                        |
| 2.07.01.2.08.    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |                  |                        |                  |                   |        | Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran                         | 100 Persen | 256,000,000       | 256,000,000       |                        |
| 2.07.01.2.08.01. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                  |                        |                  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 12 Laporan | 5,000,000         | 5,000,000         |                        |
|                  | Belanja Materai   |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |  | 12 Laporan | 5,000,000         | 5,000,000         |                        |
| 2.07.01.2.08.02. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                     |                  |                        |                  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan  | 51,000,000        | 51,000,000        |                        |
|                  | Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                        |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |  | 2 Laporan  | 51,000,000        | 51,000,000        |                        |

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                     | PRIORITAS DAERAH | SASARAN<br>PEMBANGUNAN | LOKASI           | INDIKATOR KINERJA |        |  |              | PAGU<br>INDIKATIF | PRAKIRAAN<br>MAJU | JENIS<br>PROG &<br>KEG |
|------------------|---|------------------|------------------------|------------------|-------------------|--------|--|--------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                  |   |                  |                        |                  | PROGRAM/OUTCOME   |        | KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT   |              |                   |                   |                        |
|                  |   |                  |                        |                  | URAIAN            | TARGET | URAIAN   | TARGET       |                   |                   |                        |
| (1)              | (2)   | (3)              | (4)                    | (5)              | (6)               | (7)    | (8)  | (9)          | (10)              | (11)              | (12)                   |
| 2.07.01.2.08.04. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                  |                        |                  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan   | 200,000,000       | 200,000,000       |                        |
|                  | Belanja Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |  | 12 Laporan   | 200,000,000       | 200,000,000       |                        |
| 2.07.01.2.09.    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                  |                        |                  |                   |        | Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran                              | 59.30 Persen | 156,500,000       | 156,500,000       |                        |
| 2.07.01.2.09.02. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                  |                        |                  |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 11 Unit      | 20,000,000        | 20,000,000        |                        |
|                  | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional  |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |  | 11 Unit      | 20,000,000        | 20,000,000        |                        |
| 2.07.01.2.09.06. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                  |                        |                  |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 10 Unit      | 33,000,000        | 33,000,000        |                        |
|                  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |  | 10 Unit      | 33,000,000        | 33,000,000        |                        |
| 2.07.01.2.09.09. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                  |                        |                  |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit       | 50,000,000        | 50,000,000        |                        |
|                  | Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |  | 2 Unit       | 50,000,000        | 50,000,000        |                        |
| 2.07.01.2.09.10. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                  |                        |                  |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 2 Unit       | 23,500,000        | 23,500,000        |                        |
|                  | Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |  | 2 Unit       | 23,500,000        | 23,500,000        |                        |

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                | PRIORITAS DAERAH           | SASARAN<br>PEMBANGUNAN                        | LOKASI           | INDIKATOR KINERJA  |             |  |              | PAGU<br>INDIKATIF | PRAKIRAAN<br>MAJU | JENIS<br>PROG &<br>KEG |
|------------------|--|----------------------------|---|------------------|--|-------------|--|--------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                  |  |                            |   |                  | PROGRAM/OUTCOME  |             | KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT   |              |                   |                   |                        |
|                  |  |                            |   |                  | URAIAN   | TARGET      | URAIAN   | TARGET       |                   |                   |                        |
| (1)              | (2)  | (3)                        | (4)   | (5)              | (6)  | (7)         | (8)  | (9)          | (10)              | (11)              | (12)                   |
| 2.07.01.2.09.11. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya               |                            |   |                  |  |             | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit       | 30,000,000        | 30,000,000        |                        |
|                  | Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya       |                            |   | Kabupaten Natuna |  |             |  | 2 Unit       | 30,000,000        | 30,000,000        |                        |
| 2.07.02.         | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA   | Peningkatan Ekonomi Daerah | Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja |                  | PERSENTASE KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN YANG MENGACU KE RENCANA TENAGA KERJA | 70 Persen   |  |              | 100,000,000       | 0                 |                        |
| 2.07.02.2.01.    | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)  |                            |   |                  |  |             | Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota  | 1 Dokumen    | 100,000,000       | 0                 |                        |
| 2.07.02.2.01.02. | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro  |                            |   |                  |  |             | Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro  | 3 Perusahaan | 100,000,000       | 0                 |                        |
|                  | Dokumen Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro  |                            |   | Kabupaten Natuna |  |             |  | 3 Perusahaan | 100,000,000       | 0                 |                        |
| 2.07.03.         | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA   | Peningkatan Ekonomi Daerah | Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja |                  | PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI                           | 0,12 Persen |  |              | 476,356,020       | 580,200,000       |                        |
| 2.07.03.2.01.    | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi  |                            |   |                  |  |             | Lulusan Bersertifikat Kompetensi   | 75 Persen    | 326,356,020       | 430,200,000       |                        |
| 2.07.03.2.01.01. | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi |                            |   |                  |  |             | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n                             | 16 Orang     | 196,556,020       | 300,400,000       |                        |
|                  | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi |                            |   | Kabupaten Natuna |  |             |  | 16 Orang     | 196,556,020       | 300,400,000       |                        |

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB KEGIATAN  | PRIORITAS DAERAH | SASARAN<br>PEMBANGUNAN | LOKASI           | INDIKATOR KINERJA |        |   |             | PAGU<br>INDIKATIF | PRAKIRAAN<br>MAJU | JENIS<br>PROG &<br>KEG |
|------------------|--|------------------|------------------------|------------------|-------------------|--------|---|-------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                  |  |                  |                        |                  | PROGRAM/OUTCOME   |        | KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT  |             |                   |                   |                        |
|                  |  |                  |                        |                  | URAIAN            | TARGET | URAIAN  | TARGET      |                   |                   |                        |
| (1)              | (2)  | (3)              | (4)                    | (5)              | (6)               | (7)    | (8)   | (9)         | (10)              | (11)              | (12)                   |
| 2.07.03.2.01.02. | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja |                  |                        |                  |                   |        | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | 1 Lembaga   | 50,000,000        | 50,000,000        |                        |
|                  | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |   | 1 Lembaga   | 50,000,000        | 50,000,000        |                        |
| 2.07.03.2.01.03. | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota  |                  |                        |                  |                   |        | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja  | 2 Unit      | 79,800,000        | 79,800,000        |                        |
|                  | Pengadaan Engine Stand Sepeda Motor Model Life Engine 4 Tag  |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |   | 2 Unit      | 79,800,000        | 79,800,000        |                        |
| 2.07.03.2.02.    | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta   |                  |                        |                  |                   |        | Persentase LPKS yang Terakreditasi  | 50 Persen   | 50,000,000        | 50,000,000        |                        |
| 2.07.03.2.02.01. | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta   |                  |                        |                  |                   |        | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina   | 1 Lembaga   | 50,000,000        | 50,000,000        |                        |
|                  | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta   |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |   | 1 Lembaga   | 50,000,000        | 50,000,000        |                        |
| 2.07.03.2.03.    | Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja  |                  |                        |                  |                   |        | Persentase LPK yang Memiliki Perizinan  | 50 Persen   | 50,000,000        | 50,000,000        |                        |
| 2.07.03.2.03.01. | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi   |                  |                        |                  |                   |        | Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi  | 1 Perizinan | 50,000,000        | 50,000,000        |                        |
|                  | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi   |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |   | 1 Perizinan | 50,000,000        | 50,000,000        |                        |
| 2.07.03.2.04.    | Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil   |                  |                        |                  |                   |        | Persentase Perusahaan yang Menerapkan Program Peningkatan Produktivitas   | 10 Persen   | 50,000,000        | 50,000,000        |                        |

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PRIORITAS DAERAH                  | SASARAN<br>PEMBANGUNAN                               | LOKASI           | INDIKATOR KINERJA                               |           |   |                  | PAGU<br>INDIKATIF | PRAKIRAAN<br>MAJU | JENIS<br>PROG &<br>KEG |
|------------------|---|-----------------------------------|--|------------------|---|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                  |   |                                   |  |                  | PROGRAM/OUTCOME                                 |           | KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT  |                  |                   |                   |                        |
|                  |   |                                   |  |                  | URAIAN  | TARGET    | URAIAN  | TARGET           |                   |                   |                        |
| (1)              | (2)   | (3)                               | (4)  | (5)              | (6)   | (7)       | (8)   | (9)              | (10)              | (11)              | (12)                   |
| 2.07.03.2.04.01. | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil                |                                   |  |                  |   |           | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas   | 5 Perusahaan     | 50,000,000        | 50,000,000        |                        |
|                  | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil                |                                   |  | Kabupaten Natuna |   |           |   | 5 Perusahaan     | 50,000,000        | 50,000,000        |                        |
| 2.07.04.         | <b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>                                      | <b>Peningkatan Ekonomi Daerah</b> | <b>Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja</b> |                  | <b>PERSENTASE INFORMASI TENAGA KERJA</b>        | 94 Persen |   |                  | 100,000,000       | 100,000,000       |                        |
| 2.07.04.2.03.    | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja   |                                   |  |                  |   |           | Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)                                  | 10 Orang         | 100,000,000       | 100,000,000       |                        |
| 2.07.04.2.03.01. | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online          |                                   |  |                  |   |           | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                                       | 1 Dokumen        | 50,000,000        | 50,000,000        |                        |
|                  | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online          |                                   |  | Kabupaten Natuna |   |           |   | 1 Dokumen        | 50,000,000        | 50,000,000        |                        |
| 2.07.04.2.03.02. | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online                       |                                   |  |                  |   |           | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)                   | 1 Orang          | 50,000,000        | 50,000,000        |                        |
|                  | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online                       |                                   |  | Kabupaten Natuna |   |           |   | 1 Orang          | 50,000,000        | 50,000,000        |                        |
| 2.07.04.         | <b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>                                      | <b>Peningkatan Ekonomi Daerah</b> | <b>Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja</b> |                  | <b>PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN</b> | 92 Persen |   |                  | 290,000,000       | 290,000,000       |                        |
| 2.07.04.2.01.    | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota                              |                                   |  |                  |   |           | Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota   | 6 Lowongan Kerja | 260,000,000       | 260,000,000       |                        |
| 2.07.04.2.01.01. | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja                                |                                   |  |                  |   |           | Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi | 2 Orang          | 50,000,000        | 50,000,000        |                        |
|                  | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja                                |                                   |  | Kabupaten Natuna |   |           |   | 2 Orang          | 50,000,000        | 50,000,000        |                        |

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB KEGIATAN                         | PRIORITAS DAERAH | SASARAN<br>PEMBANGUNAN | LOKASI           | INDIKATOR KINERJA |        |   |           | PAGU<br>INDIKATIF | PRAKIRAAN<br>MAJU | JENIS<br>PROG &<br>KEG |
|------------------|---|------------------|------------------------|------------------|-------------------|--------|---|-----------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                  |   |                  |                        |                  | PROGRAM/OUTCOME   |        | KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT  |           |                   |                   |                        |
|                  |   |                  |                        |                  | URAIAN            | TARGET | URAIAN  | TARGET    |                   |                   |                        |
| (1)              | (2)   | (3)              | (4)                    | (5)              | (6)               | (7)    | (8)   | (9)       | (10)              | (11)              | (12)                   |
| 2.07.04.2.01.02. | Pelayanan antar Kerja   |                  |                        |                  |                   |        | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL   | 10 Orang  | 30,000,000        | 30,000,000        |                        |
|                  | Pelayanan antar Kerja   |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |   | 10 Orang  | 30,000,000        | 30,000,000        |                        |
| 2.07.04.2.01.03. | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja   |                  |                        |                  |                   |        | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan  | 20 Orang  | 130,000,000       | 130,000,000       |                        |
|                  | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja   |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |   | 20 Orang  | 130,000,000       | 130,000,000       |                        |
| 2.07.04.2.01.05. | Perluasan Kesempatan Kerja  |                  |                        |                  |                   |        | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja                                | 20 Orang  | 50,000,000        | 50,000,000        |                        |
|                  | Perluasan Kesempatan Kerja  |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |   | 20 Orang  | 50,000,000        | 50,000,000        |                        |
| 2.07.04.2.02.    | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                  |                        |                  |                   |        | Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Antar Kerja Lokal dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota       | 1 Lembaga | 20,000,000        | 20,000,000        |                        |
| 2.07.04.2.02.01. | Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi  |                  |                        |                  |                   |        | Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi  | 2 Lembaga | 10,000,000        | 10,000,000        |                        |
|                  | Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi  |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |   | 2 Lembaga | 10,000,000        | 10,000,000        |                        |
| 2.07.04.2.02.02. | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS   |                  |                        |                  |                   |        | Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku                       | 2 Lembaga | 10,000,000        | 10,000,000        |                        |
|                  | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS   |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |   | 2 Lembaga | 10,000,000        | 10,000,000        |                        |
| 2.07.04.2.04.    | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota                                 |                  |                        |                  |                   |        | Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang Mendapatkan Sosialisasi | 10 Persen | 10,000,000        | 10,000,000        |                        |

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB KEGIATAN  | PRIORITAS DAERAH           | SASARAN<br>PEMBANGUNAN                        | LOKASI           | INDIKATOR KINERJA  |          |  |              | PAGU<br>INDIKATIF | PRAKIRAAN<br>MAJU | JENIS<br>PROG &<br>KEG |
|------------------|--|----------------------------|---|------------------|--|----------|--|--------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                  |  |                            |   |                  | PROGRAM/OUTCOME  |          | KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT   |              |                   |                   |                        |
|                  |  |                            |   |                  | URAIAN   | TARGET   | URAIAN   | TARGET       |                   |                   |                        |
| (1)              | (2)  | (3)                        | (4)   | (5)              | (6)  | (7)      | (8)  | (9)          | (10)              | (11)              | (12)                   |
| 2.07.04.2.04.03. | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan   |                            |   |                  |  |          | Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan   | 5 Orang      | 10,000,000        | 10,000,000        |                        |
|                  | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan   |                            |   | Kabupaten Natuna |  |          |  | 5 Orang      | 10,000,000        | 10,000,000        |                        |
| 2.07.05.         | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL  | Peningkatan Ekonomi Daerah | Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja |                  | PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK (PP/PKB, LKS BIPARTIT, STRUKTUR SKALA UPAH, DAN TERDAFTAR PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN) | 3 Persen |  |              | 320,000,000       | 450,000,000       |                        |
| 2.07.05.2.01.    | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota           |                            |   |                  |  |          | Persentase Perusahaan yang Memiliki Peraturan Perusahaan (PP)  | 4 Persen     | 100,000,000       | 100,000,000       |                        |
| 2.07.05.2.01.01. | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan  |                            |   |                  |  |          | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | 5 Perusahaan | 100,000,000       | 100,000,000       |                        |
|                  | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan  |                            |   | Kabupaten Natuna |  |          |  | 5 Perusahaan | 100,000,000       | 100,000,000       |                        |
| 2.07.05.2.02.    | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                                    |                            |   |                  |  |          | Persentase perkara yang diselesaikan   | 55 Persen    | 220,000,000       | 350,000,000       |                        |
| 2.07.05.2.02.01. | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                            |   |                  |  |          | Jumlah Perselisihan yang Dicegah   | 1 Perkara    | 90,000,000        | 150,000,000       |                        |



PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB KEGIATAN  | PRIORITAS DAERAH                         | SASARAN<br>PEMBANGUNAN                           | LOKASI           | INDIKATOR KINERJA  |           |   |                                | PAGU<br>INDIKATIF | PRAKIRAAN<br>MAJU | JENIS<br>PROG &<br>KEG |
|------------------|--|--|--|------------------|--|-----------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                  |  |  |  |                  | PROGRAM/OUTCOME  |           | KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT  |                                |                   |                   |                        |
|                  |  |  |  |                  | URAIAN   | TARGET    | URAIAN  | TARGET                         |                   |                   |                        |
| (1)              | (2)  | (3)                                      | (4)  | (5)              | (6)  | (7)       | (8)   | (9)                            | (10)              | (11)              | (12)                   |
|                  | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |  |  | Kabupaten Natuna |  |           |   | 1 Perkara                      | 90,000,000        | 150,000,000       |                        |
| 2.07.05.2.02.03. | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi   |  |  |                  |  |           | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi                       | 3 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 50,000,000        | 50,000,000        |                        |
|                  | Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi                   |  |  | Kabupaten Natuna |  |           |   | 3 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 50,000,000        | 50,000,000        |                        |
| 2.07.05.2.02.05. | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja   |  |  |                  |  |           | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 3200 Orang                     | 80,000,000        | 150,000,000       |                        |
|                  | Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja  |  |  | Kabupaten Natuna |  |           |   | 3200 Orang                     | 80,000,000        | 150,000,000       |                        |
| 01.02.           | <u>BALAI LATIHAN KERJA</u>   |  |  |                  |  |           |   |                                | 57,000,000        | 57,000,000        |                        |
| 2.07.01.         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel |                  | PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP | 85 Persen |   |                                | 57,000,000        | 57,000,000        |                        |
| 2.07.01.2.06.    | Administrasi Umum Perangkat Daerah   |  |  |                  |  |           | Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran                            | 57 Persen                      | 23,000,000        | 23,000,000        |                        |
| 2.07.01.2.06.01. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   |  |  |                  |  |           | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    | 12 Paket                       | 3,000,000         | 3,000,000         |                        |
|                  | Belanja Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |  |  | Kabupaten Natuna |  |           |   | 12 Paket                       | 3,000,000         | 3,000,000         |                        |

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PRIORITAS DAERAH | SASARAN<br>PEMBANGUNAN | LOKASI              | INDIKATOR KINERJA |        |  |            | PAGU<br>INDIKATIF | PRAKIRAAN<br>MAJU | JENIS<br>PROG &<br>KEG |
|------------------|---|------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--------|--|------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                  |   |                  |                        |                     | PROGRAM/OUTCOME   |        | KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT   |            |                   |                   |                        |
|                  |   |                  |                        |                     | URAIAN            | TARGET | URAIAN   | TARGET     |                   |                   |                        |
| (1)              | (2)   | (3)              | (4)                    | (5)                 | (6)               | (7)    | (8)  | (9)        | (10)              | (11)              | (12)                   |
| 2.07.01.2.06.02. | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                             |                  |                        |                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan         | 12 Paket   | 5,000,000         | 5,000,000         |                        |
|                  | Belanja Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                |                  |                        | Kabupaten<br>Natuna |                   |        |  | 12 Paket   | 5,000,000         | 5,000,000         |                        |
| 2.07.01.2.06.03. | Penyediaan Peralatan Rumah<br>Tangga  |                  |                        |                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan                    | 12 Paket   | 5,000,000         | 5,000,000         |                        |
|                  | Penyediaan peralatan<br>rumah tangga  |                  |                        | Kabupaten<br>Natuna |                   |        |  | 12 Paket   | 5,000,000         | 5,000,000         |                        |
| 2.07.01.2.06.04. | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor   |                  |                        |                     |                   |        | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                     | 12 Paket   | 2,000,000         | 2,000,000         |                        |
|                  | Belanja Bahan Logistik<br>Kantor  |                  |                        | Kabupaten<br>Natuna |                   |        |  | 12 Paket   | 2,000,000         | 2,000,000         |                        |
| 2.07.01.2.06.05. | Penyediaan Barang Cetak<br>dan Penggandaan                                  |                  |                        |                     |                   |        | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan         | 24 Paket   | 3,000,000         | 3,000,000         |                        |
|                  | Belanja Cetak   |                  |                        | Kabupaten<br>Natuna |                   |        |  | 12 Paket   | 1,500,000         | 1,500,000         |                        |
|                  | Belanja Penggandaan   |                  |                        | Kabupaten<br>Natuna |                   |        |  | 12 Paket   | 1,500,000         | 1,500,000         |                        |
| 2.07.01.2.06.09. | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     |                  |                        |                     |                   |        | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | 10 Laporan | 5,000,000         | 5,000,000         |                        |
|                  | Belanja Makan Minum<br>Rapat  |                  |                        | Kabupaten<br>Natuna |                   |        |  | 5 Laporan  | 500,000           | 500,000           |                        |
|                  | Belanja Perjalanan Dinas  |                  |                        | Kabupaten<br>Natuna |                   |        |  | 5 Laporan  | 4,500,000         | 4,500,000         |                        |
| 2.07.01.2.07.    | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah      |                  |                        |                     |                   |        | Persentase peningkatan<br>barang milik perangkat<br>daerah                   | 55 Persen  | 10,000,000        | 10,000,000        |                        |
| 2.07.01.2.07.06. | Pengadaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                    |                  |                        |                     |                   |        | Jumlah Unit Peralatan<br>dan Mesin Lainnya yang<br>Disediakan                | 4 Unit     | 10,000,000        | 10,000,000        |                        |
|                  | Pengadaan Camera  |                  |                        | Kabupaten<br>Natuna |                   |        |  | 1 Unit     | 3,000,000         | 3,000,000         |                        |
|                  | Pengadaan Mesin<br>Penghancur Kertas  |                  |                        | Kabupaten<br>Natuna |                   |        |  | 1 Unit     | 3,000,000         | 3,000,000         |                        |
|                  | Pengadaan Stabilizer  |                  |                        | Kabupaten<br>Natuna |                   |        |  | 1 Unit     | 2,000,000         | 2,000,000         |                        |

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PRIORITAS DAERAH | SASARAN<br>PEMBANGUNAN | LOKASI           | INDIKATOR KINERJA                                 |            |  |            | PAGU<br>INDIKATIF | PRAKIRAAN<br>MAJU | JENIS<br>PROG &<br>KEG |
|------------------|---|------------------|------------------------|------------------|---|------------|--|------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                  |   |                  |                        |                  | PROGRAM/OUTCOME                                   |            | KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT   |            |                   |                   |                        |
|                  |   |                  |                        |                  | URAIAN  | TARGET     | URAIAN   | TARGET     |                   |                   |                        |
| (1)              | (2)   | (3)              | (4)                    | (5)              | (6)   | (7)        | (8)  | (9)        | (10)              | (11)              | (12)                   |
|                  | Pengadaan UPS   |                  |                        | Kabupaten Natuna |   |            |  | 1 Unit     | 2,000,000         | 2,000,000         |                        |
| 2.07.01.2.08.    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |                  |                        |                  |   |            | Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran       | 100 Persen | 24,000,000        | 24,000,000        |                        |
| 2.07.01.2.08.01. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                  |                        |                  |   |            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                        | 12 Laporan | 5,000,000         | 5,000,000         |                        |
|                  | Belanja matrai  |                  |                        | Kabupaten Natuna |   |            |  | 12 Laporan | 5,000,000         | 5,000,000         |                        |
| 2.07.01.2.08.04. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                       |                  |                        |                  |   |            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 19,000,000        | 19,000,000        |                        |
|                  | Belanja Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                  |                        | Kabupaten Natuna |   |            |  | 12 Laporan | 19,000,000        | 19,000,000        |                        |
| 3.               | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN   |                  |                        |                  |   |            |  |            | 330,000,000       | 360,000,000       |                        |
| 3.32.            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI                                     |                  |                        |                  |   |            |  |            | 330,000,000       | 360,000,000       |                        |
| 01.01.           | <u>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</u>                                  |                  |                        |                  |   |            |  |            | 330,000,000       | 360,000,000       |                        |
| 3.32.02.         | PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                    |                  |                        |                  | PERSENTASE KAWASAN TRANSMIGRASI YANG DITETAPKAN   | 100 Persen |  |            | 210,000,000       | 210,000,000       |                        |
| 3.32.02.2.01.    | Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                |                  |                        |                  |   |            | Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi Penetapannya           | 1 Kawasan  | 210,000,000       | 210,000,000       |                        |
| 3.32.02.2.01.04. | Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                  |                  |                        |                  |   |            | Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi   | 1 Dokumen  | 210,000,000       | 210,000,000       |                        |
|                  | Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                  |                  |                        | Kabupaten Natuna |   |            |  | 1 Dokumen  | 210,000,000       | 210,000,000       |                        |
| 3.32.04.         | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                   |                  |                        |                  | PERSENTASE KAWASAN TRANSMIGRASI YANG DIKEMBANGKAN | 100 Persen |  |            | 120,000,000       | 150,000,000       |                        |

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB KEGIATAN                        | PRIORITAS DAERAH | SASARAN<br>PEMBANGUNAN | LOKASI           | INDIKATOR KINERJA |        |   |                     | PAGU<br>INDIKATIF | PRAKIRAAN<br>MAJU | JENIS<br>PROG &<br>KEG |
|------------------|--|------------------|------------------------|------------------|-------------------|--------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                  |  |                  |                        |                  | PROGRAM/OUTCOME   |        | KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT  |                     |                   |                   |                        |
|                  |  |                  |                        |                  | URAIAN            | TARGET | URAIAN  | TARGET              |                   |                   |                        |
| (1)              | (2)  | (3)              | (4)                    | (5)              | (6)               | (7)    | (8)   | (9)                 | (10)              | (11)              | (12)                   |
| 3.32.04.2.01.    | Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian  |                  |                        |                  |                   |        | Jumlah Satuan Kawasan Permukiman yang Difasilitasi Pengembangannya  | 2 SKP               | 120,000,000       | 150,000,000       |                        |
| 3.32.04.2.01.01. | Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman   |                  |                        |                  |                   |        | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina  | 35 Kepala Keluarga  | 70,000,000        | 70,000,000        |                        |
|                  | Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman   |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |   | 35 Kepala Keluarga  | 70,000,000        | 70,000,000        |                        |
| 3.32.04.2.01.02. | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman |                  |                        |                  |                   |        | Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan | 6 Satuan Permukiman | 50,000,000        | 80,000,000        |                        |
|                  | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman |                  |                        | Kabupaten Natuna |                   |        |   | 6 Satuan Permukiman | 50,000,000        | 80,000,000        |                        |
| JUMLAH           |  |                  |                        |                  |                   |        |   |                     | 7,069,886,020     | 7,233,730,000     |                        |

Ranai, 23 Agustus 2022

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



HUSSYAINI, S.IP

NIP. 196408061991031018